

Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 19% Duplicate

| | |
|---------|---|
| Date | Thursday, May 31, 2018 |
| Words | 2291 Plagiarized Words / Total 12093 Words |
| Sources | More than 225 Sources Identified. |
| Remarks | Low Plagiarism Detected – Your Document needs Optional Improvement. |

EKONOMI PERADABAN: Ekonomi, Politik, Pendidikan dan Keagamaan, oleh Prof. Dr. H. Apridar, S.E., M.Si. Hak Cipta 2015 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 Telp: 0274-882262; 0274-889398; Fax: 0274-889057; E-mail: info@grahailmu.co.id Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memper banyak atau memin - dahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik

maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-602-262-451-6 Cetakan Pertama, tahun 2015 Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini KATA PENGANTAR K ompleksitas masalah yang dihadapi bangsa ini bagai benang kusut yang sulit diurai. Dari persoalan ekonomi, politik, pendidikan, dan keagamaan. Semua persoalan itu berdampak pada degradasi moral bangsa, mengikis peradaban nenek moyang kita yang santun, saling mengasihi sesama, dan berbuat baik pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras dan agama. Sehingga, generasi bangsa mengalami tuna moral. Kita juga mengalami krisis contoh suri teladan dari elit bangsa.

Oknum politisi, birokrat, teknokrat, sampai hakim penjaga keadilan pun terseret ke arus deras korupsi. Kondisi itu membuat generasi muda bagai kehilangan arah dan haluan, kehilangan contoh untuk ditiru jejak pemikirannya. Empat persoalan besar yaitu sektor ekonomi, politik, pen didikan, dan keagamaan yang saya tulis dalam buku ini semuanya bermuara pada perubahan peradaban. Kita memimpikan peradab an bangsa ini semakin baik ke depan.

Kita ingin sektor ekonomi kuat, kualitas pendidikan dan lulusan perguruan tinggi semakin baik, sektor politik tidak selalu diwarnai huru hara. Pada akhir nya, kita ingin penguatan ekonomi bangsa bisa menyejahterakan vi Ekonomi Peradaban masyarakat. Politik bisa mendidik rakyat untuk menghargai de mokrasi dan kebebasan berpikir, bukan mempraktikkan politik kotor, saling jegal, dan saling menjatuhkan. Realitas inilah yang meng inspirasi saya untuk memberi judul Ekonomi Peradaban untuk ini.

Semoga sumbangsih pemikiran dalam buku ini bisa memberi inspirasi bagi generasi muda. Membantu memberi solusi bagi para pemimpin bangsa, serta berbagi pengetahuan dengan seluruh ma syarakat Indonesia. Sesungguhnya, tulisan ini tidak akan selesai saya kerjakan jika sang Pencipta Allah SWT tidak memberikan kesehatan sehingga bisa meluangkan waktu menulis, membaca referensi di tengah kesibukan mengelola perguruan tinggi negeri. Saya juga bersyukur dilahirkan dari orang tua yang kuat dan hebat yaitu ayah saya Alm.

Abdurrahman Puteh dan ibunda Dawiyah. Dukungan mereka membuat saya semakin memahami makna hidup dan peradaban. Terima kasih untuk mereka yang saya cintai: istri tercinta Rita Meutia, dan anak-anak saya Zikra Noprita, Ahmad Zaky, Muhammad Aqil, dan Nada Nabila, yang telah kehilangan waktu bermain bersama dan mengikhhlaskan saya menulis serta mendukung seluruh kegiatan saya di perguruan tinggi. Untuk kolega dan teman diskusi, Mukhlisuddin Ilyas, Mohd Heikal, dan Masriadi Sambo, terima kasih atas diskusi yang hangat. Untuk Rektor Universitas Syah Kuala Prof.

Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia Yarmen Dinamika, dan Redaktur Desk Opini Harian Serambi Indonesia, Asnawi Kumar, terima kasih telah endorsmen apresiasi untuk buku ini. Untuk Redaktur Deks Opini Harian Rakyat Aceh dan Harian Kompas, terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini. Serta kepada seluruh kolega, dosen, mahasiswa, dan staf di Universitas Malikussaleh yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu dalam pengantar ini.

Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan Kata Pengantar vii semangat yang sama untuk menghasilkan lulusan yang memiliki berkualitas dan mampu berkontribusi dalam pembangunan Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Sesungguhnya, tak ada yang sempurna dalam jagat ini, saya mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan saya dalam menulis. Saya terbuka menerima kritik dan saran untuk perbaikan buku ini ke depan.

Aceh, 12 Februari 2015 Prof Dr H Apridar SE MSi KATA SAMBUTAN MEMBANGUN ACEH SECARA HOLISTIK S aya menyambut baik setiap kontribusi positif dalam mengisi pembangunan Aceh. Kahadiran buah pikir Profesor Apridar (Rektor Unimal Lhokseumawe, ed) menjadi sebuah catatan dan pemikiran menarik, sebagai masukan bagi pemerintah dan elemen lainnya dalam mengisi setiap ruang pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

Melalui bunga rampai ini, Profesor Apridar mengingatkan kita bahwa Aceh ini harus dibangun dengan basis ilmu pengetahuan. Karena hanya basis itulah yang akan memperkuat basisbasis lainnya. dan harus pembelajaran Aceh dalam mengisi pembangunan secara holistik. Kehadiran elemen kampus dalam pemberdayaan masyarakat dan penelitian harus lebih mengigit. Sudah saatnya kampus keluar dari paradigma simbolistik. Elemen kampus harus lihai bermain dalam kondisi apapun lebih substantif.

x Ekonomi Peradaban Pembangunan Aceh secara substantif, menjadi bagian dari cita-cita kita bersama, untuk membawa masyarakat Aceh yang mandiri dan merdeka dari kemiskinan dan ketertinggalan. Itulah kemerdekaan pembangunan substansial yang ingin kita raih. Dalam mempersiapkan pembangunan di Aceh tiga tahun ke depan, kami juga sudah menyiapkan rencana strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh atau RPJMA 2012-2017, dimana ada 10 program pembangunan yang kita prioritaskan, yaitu: 1. reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 2.

keberlanjutan perdamaian; 3. Dinul Islam, sosial, adat dan budaya; 4. ketahanan pangan dan nilai tambah pertanian; 5. penanggulangan kemiskinan; 6. pendidikan; 7. kesehatan; 8. infrastruktur yang terintegrasi; 9. sumber daya alam berkelanjutan; dan 10. masalah lingkungan hidup dan kebencanaan. Di samping program yang disiapkan Pemerintah Aceh, dalam agenda pembangunan Indonesia, Aceh juga sudah dimasukkan dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Aceh diharapkan menjadi koridor pengembangan ekonomi di wilayah Sumatera.

Dengan menjadi koridor pembangunan di wilayah Sumatera, maka jaringan ekonomi di Aceh lebih terbuka, termasuk akses langsung Aceh ke dunia internasional. Sebagai konsekuensi dari program tersebut, Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Rp1,25 triliun untuk perluasan dan pengembangan pelabuhan Krueng Geukueh di Aceh Utara. Pelabuhan ini nantinya akan menjadi salah satu gerbang ekspor produk Aceh ke dunia internasional. Kata Sambutan xi Selain pelabuhan Krueng Geukueh, fungsi tiga pelabuhan laut lainnya juga diperluas, yaitu Pelabuhan Malahayati di Aceh Besar, Pelabuhan Kuala Langsa, dan tentu saja Pelabuhan Bebas Sabang yang sampai sekarang pembangunannya masih terus berlangsung.

Untuk mendukung semua itu, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran pembangunan pada tahun 2013 sebesar Rp11,7 triliun. Sejalan dengan kehadiran program ini, perhatian terhadap sektor pertanian dan perdagangan akan kita tingkatkan. Pembangunan infrastruktur di lintas tengah dan barat akan diperbanyak untuk keadilan. Perlu kami sampaikan pula, situasi keamanan di Aceh belakangan ini sangat menggembirakan.

Bagi para insan kampus, ini harus dimanfaatkan untuk penelitian dan dapat menyampaikan kepada dunia, bahwa Aceh sudah kondusif bagi semua investasi. Saya berharap, para akademisi di Aceh harus lebih banyak lagi melakukan produksi keilmuan. Salah satunya melalui penulisan buku, baik berbasis buku populer maupun bukubuku ilmiah berbasis penelitian. Demikian harapan kami. Semoga setiap gagasan baik, selalu menjadi inspirasi bagi semua unsur masyarakat Aceh.

Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya rakyat Aceh. Banda Aceh, 15 Agustus 2014 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR v KATA SAMBUTAN ix MEMBANGUN ACEH SECARA HOLISTIK ix DAFTAR ISI xiii BAB 1 EKONOMI PERADABAN DALAM EKONOMI 1 1.1 Ekonomi Islam 1 1.2 Pengaruh Keynesian dalam Rekontruksi Ekonomi Aceh 4 1.3 Gerakan Wakaf untuk Aceh 8 1.4 Fungsi Parpol dalam Menyiapkan Kader Perencanaan dan Penganggaran 12 1.5 Membahas Krisis Pangan di Kochi University 18 1.6 Desain Ekonomi Aceh 21 1.7

Mendorong Pengembangan Bank Syariah 24 BAB 2 EKONOMI PERADABAN DALAM POLITIK 29 2.1 Runtuhnya Modal Sosial di Aceh 29 2.2 Mengisi Wali Nanggroe 32 2.3 Belajar dari Hiroshima 36 xiv Ekonomi Peradaban 2.4 Aceh dalam Wacana Disintegrasi 38 2.5 Pembangunan Berbasis Empat Pilar Kebangsaan 42 2.6 Ihwal Nilai Kebangsaan 45 BAB 3 EKONOMI PERADABAN DALAM PENDIDIKAN 49 3.1 Unimal Menuju Good University Governance 49 3.2 Unimal Menuju Pendidikan Karakter 52 3.3 Desain Pembangunan Pendidikan Aceh 55 3.4 UTU dan Pembangunan BaratSelatan 58 3.5 Universitas Jabal Ghafur Lokomotif Pembangunan Pidie 63 3.6

Pembangunan Berbasis Keilmuan 67 3.7 Memperbaiki Tunamoral 71 BAB 4 EKONOMI PERADABAN DALAM KEAGAMAAN 75 4.1 Mazhab Bohong dalam Masyarakat 75 4.2 Puasa dan Etos Kerja 78 4.3 Puasa Sebagai Pendidikan Karakter 80 4.4 Puasa, Produktivitas dan Etos Kerja 83 4.5 Keadilan dalam Islam 86 4.6 Islam Rahmatan Lilalamin 91 DAFTAR PUSTAKA 95 oo0oo Bab 1 EKONOMI PERADABAN DALAM EKONOMI 1.1 EKONOMI ISLAM E konomi berbasis Islam, atau lebih dikenal dengan sebutan Ekonomi Islam belakangan menjadi rule models, bagi sistem ekonomi di belahan dunia.

Pelaku sistem ekonomi konvensional secara masif mulai beralih kepada sistem ekonomi

Islam (syariah). Hal ini menjadi titik tolak Negara Indonesia sebagai penganut Islam mayoritas untuk memberi contoh yang lebih radikal bagi Negaranegara lain. Di saat sistem ekonomi non Islam mengalami krisis di belahan dunia saat ini, ekonomi Islam pelan-pelan menjadi solusi bagi masyarakat dunia. Ekonomi Islam hari ini benar-benar menjadi solusi dari krisis global. Unsur penting dalam ekonomi Islam yang menjadi inspirasi bagi non muslim adalah sistem ekonomi Islam berlandaskan kejujuran, produktivitas, dan berdaya guna.

Akhir dari proses dalam ekonomi Islam adalah untuk mendapat barakah dari Allah sebagai pencipta manusia. Ekonomi Islam menjadi unsur sakral dalam memarginalkan kemiskinan, bergandeng tangan untuk membawa kemaslahatan 2 Ekonomi Peradaban bagi semua elemen warga. Lebih tajam lagi, terdapat unsur pemberdayaan yang berkelanjutan dalam ekonomi Islam. Unsur-unsur tersebut menjadi pemicu inspirasi bagi semua orang untuk menerapkan sistem ekonomi Islam. Semua itu tak lepas dari kegagalan sistem ekonomi yang selama ini diterapkan, menjadi sumbu krisis global dalam sistem ekonomi konvensional.

Perbedaan utama antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional adalah: pertama, secara epistemologis ekonomi Islam dipercaya sebagai bagian ajaran Islam. Karena ia sebagai ajaran maka ekonomi Islam bersumber secara langsung dari Allah. Kedua, ekonomi Islam dilihat sebagai sistem yang bertujuan bukan hanya untuk mengatur kehidupan manusia di dunia, tapi juga menyeimbangkan kepentingan manusia di dunia dan akhirat.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari landasan normatif itu, sejumlah aspek positif atau teknis dalam ekonomi konvensional tak bisa diaplikasikan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam seperti bunga dan jenis lain yang serupa dengannya. Itulah perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Namun, bukan berarti tidak ada halangan bagi ekonomi Islam. Kendalanya adalah pada tataran implementatif masih belum mampu menyelesaikan kemelut ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan proses, sebagai sebuah rotasi dari perjalanan sejarah sistem ekonomi. Proses ini harus direspons untuk kejayaan umat Islam dan ekonomi Islam.

Bicara mengenai ekonomi Islam, mau tidak mau kita harus bersinggungan dengan dua pemikiran besar sistem ekonomi dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme (marxisme). Ekonomi Islam hadir tak semata-mata mengoreksi kedua sistem ekonomi tersebut melainkan menawarkan pemikiran yang jauh lebih baru beserta dengan sistem yang lebih memanusiaikan manusia. Di tubuh rezim rezim sosialiskomunis, seperti dipahami, cenderung otoriter di Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 3 bidang politik, sementara di bidang ekonomi, rakyat mengalami penderitaan yang mengenaskan.

Garet Garret, seperti dikutip Bernard Murchland dalam *Humanisme dan Kapitalisme* (1992), membuat sebuah kesimpulan bahwa bisnis modern terutama kapitalisme berangkat dari tiga nafsu: nafsu kebendaan, nafsu kemegahan pribadi, dan nafsu kekuasaan. Ketiga hal inilah yang membedakan Islam dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Diakui atau tidak, Islam ternyata berbeda dengan agama-agama besar lainnya. John Thomas Cummings dkk dalam *Islam dan Perubahan Ekonomi Modern* (John L. Esposito; 1986) menyebutkan bahwa Islam memberikan penganutnya suatu ajaran terperinci tentang sistem ekonomi, terutama berkaitan dengan masalah masalah perpajakan (zakat), pengeluaran pemerintah, warisan, hak-hak pribadi, kesejahteraan sosial dan ekonomi (pembagian pendapatan, kemiskinan, dan hal-hal lain), bunga uang, kepemilikan tanah, sumber alami, tingkat gaji, dan lain sebagainya. Dalam hal perpajakan, dalam Islam terdapat dua struktur pajak.

Pertama, untuk orang Islam yang langsung terambil dari sumber-sumber tersebut di atas, dan kedua, untuk orang yang tidak beragama Islam. Pajak utama dalam Islam itulah yang disebut zakat. Istilah ini digunakan berkenaan dengan hak milik atas binatang ternak, emas, perak, dan barang-barang perdagangan, serta hasil bumi. Sebagai wilayah yang menerapkan Syariat Islam, Aceh se harusnya menjadi pelopor dalam penerapan sistem ekonomi Islam, terutama bagaimana mengembangkan sistem zakat sebagai kekuatan ekonomi. Pengelolaan zakat selama ini di Aceh memang sudah jauh lebih maju dan menjadi salah satu praktik yang mendorong perekonomian masyarakat.

Sistem distribusi zakat, untuk pendidikan dan pembangunan, sudah menunjukkan hasil nyata. Namun, ke 4 Ekonomi Peradaban depan hal ini perlu lebih ditingkatkan dengan menyalurkan kelompok-kelompok rentan dalam bentuk pemberian modal usaha. Selama ini,

distribusi zakat belum menyentuh halhal tersebut. Padahal, dana zakat yang terkumpul, baik di baitul mal atau lembaga lain, jika dikelola secara profesional mampu dimanfaatkan sebagai modal usaha.

Kita mampu membantu banyak usaha kecil menengah, bahkan kelompok yang baru merintis usaha. Dengan demikian, esensi sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai salah satu media untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperkecil jurang antara si miskin dan si kaya. Dengan penerapan sistem ekonomi Islam secara benar di Aceh, kita sangat yakin akan mengantarkan Aceh menjadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. 1.2

PENGARUH KEYNESIAN DALAM REKONTRUKSI EKONOMI ACEH Pemikiran Keynesian pernah diterapkan meluas ketika depresi besar melanda dunia (tahun 1930an), sampai pada aneka krisis era 1970an, serta kembalinya penerapan kebijakan ini oleh para pakar prominen ekonomi beserta pembuat kebijakan ekonomi politik, ketika krisis 2008/2009 dimulai. Pada 2013 ini, seiring dengan kebangkitan baru spirit Keynesianisme, juga telah diterbitkan kembali edisi khusus kumpulan karya lengkapnya dalam XXX jilid oleh The Royal Economic Society, yaitu, *The Collected Writings of John Maynard Keynes* (ed. by Robinson & Moggridge), Cambridge/New York, 2013.

Seolah, pro dan kontra terhadap implementasi pemikiran ini berlangsung tanpa henti, bahkan penerapannya pun terlihat makin multidimensi. Sementara dalam hal perkembangan visi, akhirnya bersintesa dengan aneka influensi. Kaum politisi menggandrunginya karena intervensi politik yang sentral di dalamnya, di mana dengan paket konjunktur yang dipromosinya, terkadang kerap membawa Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 5 negara dalam lilitan utang.

Koran ekonomi terbesar Jerman, *Handelsblatt* (edisi 15, 16, 17 Februari 2013), bahkan memuat laporan utama visi Keynesian, pakar ekonomi yang menjelang kematiannya bergumam: *I am not a Keynesian!* Mungkinkah batasbatas tertentu dari pemikiran Keynesian bisa teraplikasikan atau dikontekstualkan dalam strategi pembangunan politik ekonomi di Aceh? Jika mungkin, baik total mau pun parsial, kondisi dan situasi Aceh kini relevan berorientasi pada perspektif teoretis ini? Bagaimana dengan relasi unik hubungan

hukum tatanegara antara pemerintahan pusat (Indonesia) dengan pemerintahan provinsi (Aceh) dalam rekonstruksi ekonomi kawasan ini? Apa diferensiasi kebijakan yang boleh dilakukan Aceh dan apa yang hanya menjadi wewenang pusat (nasional) sudah baku, seperti tertuang dalam aneka kesepakatan pasca reformasi, sejak adanya MoU Helsinki/Perjanjian Damai 15 Agustus 2005 sampai revisi aneka rancangan, peraturan, dan aneka peraturan legalitas lainnya? Refleksi umum Tulisan ini menstimulasi refleksi umum tentang batasbatas pemikiran Keynesian yang relevan.

Pandangan ini sebenarnya bertumpu pada visi tokoh ekonom kawakan, ahli matematika/ekonometri serta politisi ternama John Maynard Keynes (1883-1946), yang dikenal luas melalui visinya tentang teori umum pembangunan ekonomi, seperti tertuang dalam buku monumentalnya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936). Dengan karya inilah, JM Keynes mulai digolongkan sebagai pemikir paling berpengaruh di abad ke-20. Karya-karya Keynes telah ikut merevolusikan teori baru dan praktik ekonomi modern.

Dampak pemikirannya sangat jelas terlihat pada bagaimana cara kebijakan ekonomi secara efektif bisa diterapkan. Karyanya telah menjadi sumber inspirasi bagi semua peminat dan para ahli ekonomi/politik, bahkan kerap dipakai juga dalam 6 Ekonomi Peradaban dalam menentukan aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, masalah tenaga kerja, keseimbangan perdagangan, paket konjunktur, problem pengangguran, serta sebabsebab terjadinya inflasi, dll.

Beberapa karya atau kontribusi pemikiran lainnya, termasuk aktivitas pribadinya dalam rangka memelopori misi perdamaian dan pembangunan ekonomi dunia pascaperang, mulai dari keterlibatannya dalam perjanjian damai Versailles, revisi dan rekonstruksi ekonomi baru Eropa, sampai pada upaya agungnya mendukung pemulihan PascaPerang Dunia melalui pertemuan global Bretton Woods yang sampai kini masih memberikan dampak terusmenerus, seperti melalui Bank Dunia serta aneka lembaga ekonomi internasional lainnya.

Dengan latar belakang demikian, terlihat jelas bahwa relevansi Keynesianisme di Aceh, dalam batasbatas tertentu, bisa coba dipahami, mengingat adanya hak istimewa yang

dijamin dalam Perjanjian Damai Helsinki (2005), dengan batas otoritas yang pasti. Salah satu dasarnya, dengan jelas termaktub bahwa Aceh memiliki otoritas kekuasaan definitif, pengakuan batas wilayah hasil keputusan politik tanggal 1 Juli 1956 (MoU butir 1.1.4).

Dimensi vital selanjutnya, sesuai Perjanjian Damai Helsinki, khususnya bab 1.3

(tentang Ekonomi) terlihat adanya peran unik Pemerintah Aceh yang terbingkai dalam otoritas sistem Republik Indonesia. Pendekatan kontekstual visi Keynesian ini perlu ditelaah kembali wewenang apa yang tertuang dalam kesepakatan akhirnya. Di sini jelas terpapar beberapa hal tertentu, seperti adanya hak istimewa Aceh dalam mencari dana, negosiasi suku bunga dengan Bank Sentral RI, hak pajak, hak mencari investasi asing langsung, hak mendapatkan 70% hasil alam di wilayahnya, hak administrasi dan mengembangkan pelabuhan laut dan udara, perdagangan bebas, serta akses hubungan langsung ke luar negeri.

Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 7 Pandangan Keynesian Menelaah lebih jauh konsepsi pandangan Keynesian dalam konteks ini, mungkin relevan menilik rangkuman brilian visinya seperti yang dirumuskan filosofis karya utamanya *The General Theory*, khususnya dalam Buku VI: *Short Notes Suggested by the General Theory*, Bab 23 & 24, yang awalnya mengupas influensi pandangan ekonomi merkantilis serta pengaruh sistem proteksionistis, yang kemudian dengan tegas menyimpulkan bahwa keseimbangan perdagangan (*balance of trade*) merupakan target utama dari kebijakan ekonomi di manapun, yang ikut mengendalikan perkembangan suplai keuangan negara.

Dalam bagian akhir karyanya ini, Keynes menjabarkan juga adanya akumulasi modal saham yang besar cenderung secara *per se* mengurangi kesempatan investasi serta terjadinya propensitas (inklinasi) konsumsi yang melemah. Hubungan vital antara akumulasi modal saham dan konsumsi yang mempengaruhi faktor keseimbangan ekonomi adalah salah satu bagian sentral pemikiran Keynesian yang sampai kini tetap relevan dikaji kembali, khususnya tatkala distorsi ekonomi dalam konteks wilayah tertentu terjadi, termasuk dalam wilayah khusus seperti dalam status otoritas istimewa Pemerintahan Aceh saat ini.

Sementara itu, kontroversi pemikiran Keynesian yang banyak menimbulkan kritik adalah pandangannya mengenai batas-batas perlunya intervensi pemerintah, politik fiskal, bahaya

perdagangan bebas, kebijakan investasi pemerintah, pertumbuhan dengan kontrol Pemerintah Daerah atau Pusat. Dalam ajaran Keynesian, sesuai batasan kerangka teoretis dalam *General Theory* (hal. 379), inti visinya sebenarnya tertuju pada perlu adanya an *adjustment between the propensity to consume and the inducement to invest* (penyesuaian antara kecenderungan untuk mengonsumsi dan keinginan untuk berinvestasi). Jika kesesuaian ini tercapai, maka *equilibrium* (keseimbangan) ekonomi akan terbina.

8 Ekonomi Peradaban Namun, langkah kebijakan dan intervensi pemerintah, sesuai teori ini, hanya bisa diterapkan dengan tanpa adanya otoritarianisme politik. Bahkan sebaliknya, diperlukan adanya inisiatif dan tanggung jawab individu dalam proses keseimbangan ekonomi, dengan terjadinya dalam investasi. Di lain pihak, dalam upaya terbentuknya *full employment economy* yang baik, dimensi pengembangan kebahagiaan individu (setiap pribadi) dalam tatanan sosial yang harmonis harus ikut diperhatikan dengan adanya kebijakan pengembangan sistem kemasyarakatan yang ideal.

Ajaran Keynesian juga kurang memahami peran kreatif manusia terhadap pasar dan perkembangan global yang kadang bisa membawa kemakmuran. Langkah-langkah bijak pemerintah harus mengarah pada jalan praktis menghindari terjadinya destruksi format ekonomi yang sedang berjalan dengan aktif membina terbentuknya *successful functioning of individual initiative*. Ajaran Keynesian mungkin harus disinkronkan dengan pandangan, bahwa setiap pribadi dalam wilayah pemerintahan memiliki kemampuan mandiri ala Schumpeterian sebagai target pembangunan ekonomi bersama dalam kerangka yang telah disepakati sesuai dengan harapan sistem kendali demokrasi.

Peranan pemerintah, dalam batas tertentu, sesuai faktor efisiensi, kebebasan ekonomi mengarah pada harapan kemakmuran bersama (*udep beusaree*), bukan mengarah pada harapan kelompok tertentu atau sepihak. Kemakmuran bersama adalah berkah kehidupan.

1.3 GERAKAN WAKAF UNTUK ACEH Meneropong dan memimpikan masa depan Aceh yang lebih baik tentu tidak boleh melupakan Aceh masa lampau. Aceh masa Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 9 lampau harus menjadi inspirasi dalam bertindak dan berkontribusi untuk kemajuan Aceh hari ini.

Banyak referensi menyebutkan bahwa Aceh masa lampau bisa jaya bukan karena

sematamata andil pemimpinnya, melainkan karena ada kontribusi dari masyarakatnya, yang tidak rakus dalam mengelola sumber daya alam. Memiliki etika dagang baik dengan sesama maupun dengan orang yang tak dikenalnya. Kisah heroik Aceh masa lampau bisa dipetik dari Habib Bugak yang mewariskan Baitul Asyi di Mekkah. Konon, Habib Bugak membeli tanah di sekitar Mekkah AlMukarramah dan kemudian sebagian dari hartanya diwakafkan untuk masyarakat Aceh, tanah kelahirannya.

Sikap serupa juga dilakukan oleh orang tua kita masa lampau di setiap gampong dan dusun. Mereka mewakafkan tanah untuk pendirian dayah dan sekolahsekolah. Sebagai bukti, bisa dilacak diseantero Aceh, bahwa asal muasal tanah tempat berdirinya dayahdayah dan sekolahsekolah itu berawal dari gerakan wakaf. Gerakan wakaf pada masa lampau di Aceh adalah bagian dari kontribusi, kecintaan, dan ketaatan masyarakat untuk kemaslahatan masa depan Aceh yang berbasis Islam. Saat ini, Aceh dalam perspektif keindonesian dalam bidang perwakafan tidak dampak signifikan, walau pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No 42 tahun 2006 sebagai turunan pelaksanaan. Banyangkan dengan masa lampau, gerakan wakaf menjadi gaya hidup.

Masyarakat berlombalomba mewakafkan sebagian hartanya baik untuk tujuan pendidikan maupun lainnya. Sekarang, di Aceh malah terjadi sebaliknya, sebagian tanah wakaf yang sudah diniatkan dan dilakukan perwakafan oleh orang tua malah ditarik kembali oleh sanak atau familinya. Ini fenomena nyata dalam pengamatan sosial ekonomi dan keagamaan di Aceh setelah MoU Helsinki. 10 Ekonomi Peradaban Beranjak dari fenomena tersebut maka diperlukan gerakan yang holistik untuk mempopulerkan gaya hidup berbasis wakaf.

Gerakan ini akan lebih baik bila Pemerintah Aceh melalui baitul mal, mengambil peran yang lebih besar dalam kampanye gaya hidup berbasis wakaf. Wakaf untuk Pendidikan Hal penting perlunya gerakan wakaf Aceh adalah sebagai upaya memajukan Aceh melalui pendidikan. Wakaf untuk pendidikan menjadi penting ketika fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Aceh perlu ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan harus menjadi leading sector dalam memajukan Aceh ke depan.

Alasan lain perlunya gerakan wakaf untuk pendidikan adalah merealisasikan amanah

Undang-Undang Pendidikan untuk mengalokasikan anggaran 20% bagi pendidikan. Saat ini, dana pendidikan 20% yang diamanahkan undang-undang tidak mampu diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh. Maka, gerakan wakaf akan mereduksi ketidakmampuan Pemerintah Aceh dalam realisasi anggaran 20% pada sektor pendidikan dan penelitian. Belajar dari Jepang, melalui pemerintahnya, dana sosial dan wakaf telah menjadikan mereka lebih maju daripada Indonesia.

Jepang menggunakan dana wakaf yang diperoleh dari pihak swasta dan masyarakat untuk mendukung pendidikan dan penelitian. Maka dari itu, tak berlebihan bila ke depan, membumikan gerakan wakaf di Aceh harus dijalankan secara sistematis dan komprehensif. Pada level kajian dan penelitian, sudah seharusnya Perguruan Tinggi Islam berperan aktif dengan cara membuka prodi tentang wakaf secara merata. Pada level pemerintahan, pemerintah bisa menjadikan wakaf sebagai salah satu sektor andalan dalam pendapatan daerah yang dapat mengurangi angka kemiskinan.

Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 11 Gerakan Wakaf untuk Aceh Setidaknya, ada empat alasan perlu adanya gerakan wakaf untuk Aceh sebagai upaya menjadikan wakaf sebagai gaya hidup dan membumi penerapannya. Pertama, angka kemiskinan di Aceh sampai saat ini masih tinggi, maka diperlukan strategistrategi radikal untuk mengurangi angka kemiskinan melalui wakaf. Kedua, setelah tsunami dan MoU Helsinki, telah terjadi kesenjangan yang kontras antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.

Dengan adanya gerakan wakaf, diharapkan masyarakat kaya akan peduli terhadap masyarakat miskin dengan memberikan wakaf melalui institusi yang ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, masyarakat Aceh mayoritas muslim sehingga wakaf memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pendapatan produktif. Jika wakaf dikelola menjadi pendapatan produktif, tentu akan menjadi gerakan sosial keagamaan besar yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Keempat, Aceh selalu mendapat musibah baik dalam skala kecil maupun besar. Gerakan wakaf menjadi modal dalam setiap penanganan bencana.

Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga sosial kemasyarakatan. Dalam perspektif Indonesia, menurut Nur Kholis (2009), dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (resources capital), jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta

wakaf terbesar di seluruh dunia. Hal ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.

Menurut Uswatun Hasanah (2009), di negara yang penduduk muslimnya minor, pengembangan wakaf juga tak kalah produktif. Singapura misalnya, aset wakafnya jika dihitung berjumlah S\$250 12 Ekonomi Peradaban juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES). Gerakan wakaf diharapkan menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dalam pembangunan Aceh ke depan.

Untuk mewujudkan gerakan tersebut, berbagai upaya dan pengenalan tentang arti penting wakaf harus dilakukan terutama oleh Pemerintah Aceh, Perguruan Tinggi Islam, dan stakeholder yang ditunjuk secara terencana dan holistik. Kita percaya bahwa majunya Aceh tempo dulu karena adanya kerjasama antar pemerintah dengan warganya. Jadi, belum terlambat bagi Pemerintah Aceh untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu elemen dalam dalam memajukan Aceh. Kehebatan orang Aceh dulu karena ilmu, sikap dermawan, dan saling peduli.

Hebatnya, kejayaan Malikussaleh dan sultan kerajaan Islam lainnya ketika itu tak terlepas dari peran adanya gerakan wakaf orang Aceh. 1.4 FUNGSI PARPOL DALAM MENYIAPKAN KADER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Partai politik memiliki peran besar dalam membawa perubahan dalam pembangunan bangsa. Partai politik menjadi berwibawa bila dikelola dengan benar-benar berdasarkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan. Adanya persaingan antar partai politik tidak terlepas dari perilaku sumber daya manusia di dalamnya dalam mewujudkan kemakmuran bangsa.

Eksistensi sebuah partai politik sangat tergantung pada kemampuan para kadernya dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Setiap partai dan organisasi pada hakikatnya memiliki tujuan yang mulia untuk kemaslahatan bersama. James I. Gibson (1989:3) mengistilahkan dengan perilaku yang terarah pada tujuan (*directed behavior*). Artinya, organisasi itu mengejar tujuan Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 13 dan sasaran yang

dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Setiap calon legislatif perlu memiliki konsep dasar mengenai perencanaan dan penganggaran.

Kemampuan ini mutlak dimiliki dalam mengemban amanah rakyat. Karenanya, seorang calon legislatif sudah harus mampu menganalisis anggaran. Analisa anggaran bisa dilakukan dalam hal penerimaan ABPN dan APBD. Pemahaman umum seperti struktur anggaran, sumber anggaran, alokasi anggaran, belanja publik, belanja pegawai harus betul-betul dikuasai secara matang sebelum terpilih. Dengan memahami dasar perencanaan dan penganggaran, seorang calon legislatif tentu tidak akan berani berjanji yang aneh-aneh untuk meraup suara rakyatnya.

Calon legislatif harus menawarkan program yang benar-benar bisa dilakukannya bila terpilih. Tentu dengan program-program logis sesuai dengan analisa ketersediaan anggaran yang ada pada suatu daerah. Kemampuan analisa ekonomi mikro seorang calon legislatif harus diasah dengan mengetahui kemampuan anggaran suatu daerah. Kalau tanpa modal pengetahuan analisa anggaran daerah dan modal perencanaan yang kuat, tidak mustahil akan muncul legislator tanpa kontribusi.

Dalam hal ini, masyarakat Aceh juga harus cerdas memilih wakilnya, supaya dapat membawa manfaat yang berkelanjutan untuk semua warga. Masyarakat sudah saatnya meninggalkan para calon legislatif yang menawarkan program-program cet langet yang mementingkan golongannya daripada kepentingan masyarakat secara umum. Janji-janji politik irrasional yang tidak sehat bagi pengembangan masyarakat Aceh ke depan. Makanya, pembangunan Aceh ke depan harus dilakukan dengan pendekatan keilmuan pada semua sektor.

14 Ekonomi Peradaban Fungsi Partai Politik Menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan parpol adalah untuk mencari dan

memper tahankan kekuasaan guna melaksanakan/mewujudkan program program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Menurut UU Nomor 2 tahun 2008, setidaknya terdapat empat fungsi dari partai politik. Pertama, partai politik sebagai saran komunikasi politik.

Komunikasi politik artinya proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol di sini berfungsi untuk me nyerap, menghimpun, mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan. Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik artinya proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara.

Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan programprogram dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Re krutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Perlu dilakukan proses seleksi dalam pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 15 parpol itu dalam suatu bidang.

Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik. Keempat, partai sebagai pengatur Pengatur adalah suatu (dalam ini perbedaan atau fisik) suatu yang pemerintah. konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung, dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD/Camat) untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tadi. Basis Perencanaan Perencanaan dalam politik adalah suatu hal yang sangat esensial.

Perencanaan proses tujuan membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Artinya, kemampuan politisi dalam bidang perencanaan sangat penting untuk memberi kontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dalam ilmu

perencanaan, sudah menjadi tradisi bahwa setidaknya ada empat tahapan dasar dalam sebuah perencanaan. Hal ini juga berlaku dalam bidang politik. Pertama, tahapan menetapkan tujuan. Sebuah perencanaan yang baik harus dimulai dengan keputusan-keputusan mengenai keinginan atau kebutuhan organisasi.

Kedua, tahapan merumuskan keadaan saat ini. Sebuah partai politik harus memahami keadaan rakyat saat ini. Ketiga, tahapan segala dan dan Keempat, tahapan mengembangkan rencana yang berbasis pada kebutuhan rakyat. Mengemban tugas sebagai penyambung lidah rakyat haruslah memiliki strategi dan perencanaan yang matang. Terlibat dalam gerakan partai politik harus benar-benar direncanakan, baik 16 Ekonomi Peradaban sebelum menjadi anggota dewan, maupun setelah menjadi anggota dewan.

Minimal dalam jiwa setiap kader partai politik harus mengetahui makna dari perencanaan itu sendiri. Perencanaan yang baik tentu akan membantu untuk menye suaikan diri dengan lingkungan politik yang dinamis, membantu untuk mengembangkan tanggung jawab lebih baik, memudahkan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan mudah memahami kebutuhan rakyat. Keberadaan seorang politisi harus mampu berdampak sistemik un tuk membawa keberkahan kepada semua elemen masyarakat.

Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan empat tujuan perencanaan. Pertama, memberikan arah baik untuk pimpinan pemerintah maupun masyarakat. Kedua, untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang pimpinan membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Ketiga, untuk meminimalisir pemborosan.

Dengan kerja yang terarah dan terencana, setiap abdi negara dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Keempat, proses pengontrolan dan pengevaluasian dalam setiap program yang dilakukan oleh semua unit pemerintah. Berbasis Penganggaran Seorang kader partai politik, sudah seharusnya memiliki nalar analisis terhadap anggaran (budget) dalam setiap tahapan politik. Kemampuan ini dibutuhkan karena seorang kader politik memiliki kesempatan untuk menjadi anggota legislatif mewakili aspirasi rakyatnya.

Anggaran (budget) dalam artian konsep adalah rencana kuantitatif aktivitas sebuah organisasi (pemasaran, produksi dan keuangan); anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 17 dianggarkan. Kalau dalam artian organisasi politik, anggaran berarti dimulai dari anggaran masuk, keluar, tahap realisasi, dan pengawasan. Sedangkan penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan.

Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Dalam konteks inilah, seorang kader partai politik harus memiliki basis pemahaman yang baik tentang tujuan penganggaran dalam menjalankan fungsinya sebagai legislator. Tujuan pokok anggaran adalah untuk memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non finansial di masa yang akan datang. Tujuan lainnya adalah mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran.

Melalui pemahaman penganggaran yang baik oleh setiap kader partai politik, maka akan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun secara khusus, pemahaman yang baik itu, akan membawa kemudahan dalam menjalankan amanah rakyat aspiratif dan partisipatif. Hal ini akan memberikan landasan untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik bagi semua elemen rakyat. Proses penganggaran bukanlah ilmu murni dan pertimbangan yang baik memainkan peran yang esensial.

Bila legislator memiliki anggaran, ia memfilter yang tidak berpihak kepada rakyat. Peralnya, mereka mengetahui setiap perkembangan dan bisa melakukan program-program yang prorakyat dengan analisa anggaran yang tersedia. Dalam banyak kejadian, anggaran cenderung terlalu menyederhanakan fakta dan situasi nyata di lapangan. Di situlah peran kader partai politik harus partisipatif pada anggaran, menuntut dukungan penuh, dan keterlibatan manajemen organisasi politik secara umum.

Bila melihat bentuk sistem penganggaran, terdapat 4 (empat) rancangan dasar anggaran; 1) penganggaran 18 Ekonomi Peradaban incremental, 2) penganggaran basis nol, 3)

penganggaran statik, dan 4) penganggaran fleksibel. Tapi bila dilihat dari proses penganggaran, maka struktur operasionalnya harus dahulu pe nyusunan anggaran dan mendiskusikan perannya dalam perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian.

Kemudian mengidentifikasi utamanya, menguraikan penganggaran dengan sistem penganggaran yang sesuai dengan Undang-Undang untuk mendorong pertumbuhan masyarakat berkelanjutan. Jadi, jelas bahwa fungsi partai politik dalam menyiapkan kader ahli perencanaan dan penganggaran sangat vital dalam pembangunan masyarakat Aceh ke depan. Pembangunan masyarakat ke depan harus dibangun dengan basis pengetahuan dalam semua sisi pembangunan.

Sudah saatnya masyarakat Aceh meninggalkan para politisi (legislatif) tanpa bekal pengetahuan. Minimal, para politisi mempunyai pengetahuan berbasis pada perencanaan dan penganggaran. Semoga!

1.5 MEMBAHAS KRISIS PANGAN DI KOCHI UNIVERSITY

Setelah meninjau lokasi pengeboman dan museum, serta menghadiri pertemuan akademis lainnya di Hiroshima, kami yang tergabung dalam delegasi The 3rd of SUIJI Internasional menggunakan kereta cepat Shinkansen menuju Kota Kochi yang sejuk dan tenang.

Pertemuan puncak akademisi digelar di Southern City Hotel Kochi, 2830 Agustus 2013. Isu yang akan dibahas dalam pertemuan Internasional ini adalah dampak pemanasan global terhadap krisis pangan dunia, selain berbagai topik menarik lainnya dalam rangka peningkatan pangan dunia. Delegasi dari Indonesia yang hadir adalah Rektor UNHAS Prof Idrus, Rektor IPB Prof Herry, Rektor USU Prof Syahril, Rektor Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 19 UNIMAL Dr Apridar, dan delegasi UGM yang disambut oleh Rektor Universitas Kochi, Hiroshi Wakiguchi, Ph.D.

Melalui pertemuan tersebut, Universitas yang memiliki Fakultas Pertanian (FP) yang tergabung dalam Six University Initiative Japan-Indonesia (SUIJI) diharapkan dapat memberikan berbagai alternatif solusi persoalan pangan dunia. Konsorsium ini juga salah satu jaringan yang dibangun untuk dapat melakukan penelitian bersama (joint research) dalam rangka peningkatan kualitas penelitian sebagaimana disarankan oleh Dikti (pendidikan tinggi, ed). Para delegasi Rektor dari Indonesia juga membahas berbagai kegiatan tahunan yang dilakukan di Jepang dan di Indonesia.

Penelitian bersama merupakan program prioritas yang akan diusung ke depan. Universitas Hasanuddin dari Indonesia dipercayakan sebagai tuan rumah kegiatan SUIJI ke4 tahun 2014. Bagi Universitas Malikussaleh, hal ini adalah peluang yang perlu direspon segera. Dengan adanya jaringan yang dibangun ini, diharapkan skema penelitian Joint research yang anggarannya setiap tahun disisipkan oleh Dikti dapat dimanfaatkan para peneliti dari Universitas Malikussaleh secara maksimal. Selain itu, dalam pertemuan Internasional tersebut, juga dibahas peranan mahasiswa bagi masyarakat yang dikemas melalui Program KKN (kuliah Kerja Nyata) bersama.

Kochi University menawarkan program jasa mahasiswa dan kepedulian sambil belajar. Program KKN tentu akan bermanfaat bagi pengembangan kapasitas mahasiswa ke depan. Hal ini sekaligus untuk menangkalkan krisis moral yang terjadi akibat lunturnya nilai empati dari elemen kampus. Universitas dianggap kurang dapat mendengar dan merasakan apa yang dikehendaki masyarakat secara umum. Join program yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan nuansa berpikir dan kiprah insan kampus di masyarakat.

20 Ekonomi Peradaban Setelah aktif dalam konferensi, seluruh delegasi juga mengunjungi berbagai sentral perkebunan/laboratorium pertanian Ko chi University. Secara umum, Kochi merupakan daerah pertanian yang dipisahkan oleh lautan dan pengunungan. Dibangunnya jalan dan jalur kereta puluhan kilometer di atas laut, membuat daerah penghasil pertanian ini tumbuh pesat, seperti kotakota lain di Je pang. Walaupun ada beberapa pabrik yang dibangun dekat pengunungan. Namun, panorama alam Kochi tidak pernah diganggu.

Pembangunan rel kereta yang mengharuskan banyak gunung mes ti ditembusi, namun gunungnya tetap dijaga keasriannya. Hal ini terlihat pada aliran sungai yang airnya cukup jernih dan sering di gunakan penikmat arum jeram untuk berpetualang. Sebagian besar hasil produk pertanian Kochi, disuplai ke berbagai kota tetangga di Jepang. Pembangunan jalan dan rel kereta yang menghabiskan anggaran cukup besar, berdampak positif terhadap pembangunan pertanian di Kochi.

Produk pertanian Kochi, kualitasnya mampu bersaing dengan produk impor lainnya. Sikap masyarakatnya yang selalu bekerja keras untuk hasil yang terbaik telah tertanam dalam

benak masyarakat Jepang. Kualitas hasil produksi selalu dijaga. Hasil pertanian yang cacat atau sering orang sering menyebutnya sebagai kualitas kedua, di Jepang tidak pernah dipakai atau dijual. Barang reject tersebut selalu dibuang. Tertanam sebuah nilai dalam jiwa masyarakat Jepang untuk selalu berbuat yang terbaik dan selalu bekerja keras.

Bila tidak, maka hasilnya akan sia-sia. Ketika orang menyebut Jepang, maka yang tergambar dalam benak manusia adalah kualitas terbaik hasil produksinya. Kesungguhan hati untuk berbuat yang terbaik ini hendaknya dapat diterapkan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Sebagai kalifah di muka bumi, hendaknya setiap pekerjaan yang dilakukan Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 21 merupakan karya terbaik sebagai pertanggung jawaban kita kepada Khalik dan sesama.

Semoga ke depan, melalui dukungan semua elemen kampus dan pemerintah, Universitas Malikussaleh menjadi tuan rumah SixUniversity Initiative JapanIndonesia (SUIJI). 1.6 DESAIN EKONOMI ACEH Membangun Aceh yang lebih baik salah satunya harus melalui desain ekonomi yang benar-benar menguntungkan masyarakat kelas bawah. Tidak mudah menyusun desain ekonomi Aceh yang mampu perubahan dalam sosial masyarakat Aceh pasca-tsunami dan konflik. Namun di atas cita-cita itu, desain ekonomi Pemerintahan Zaini AbdullahMuzakir Manaf (ZIKIR) harus benar-benar sesuai dengan visi dan misi.

ZainiMuzakir harus secara elegan menerjemahkan visi dan misi dalam bentuk implementasi program program berbasis ekonomi kerakyatan. Hal ini tak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus dalam bentuk skala besar dan integral demi kemaslahatan rakyat Aceh. Pemerintahan ZainiMuzakir harus tahu program konkrit apa yang harus dilakukan untuk memajukan perekonomian Aceh. Dalam sebuah interview dengan salah satu media, saya memberi catatan bahwa pemerintah Aceh harus membuka peluang untuk mendesain ekonomi berbasis kerakyatan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Ekonomi kerakyatan bukanlah sistem ekonomi berbasis proposal yang hanya menguntungkan mereka yang ahli dalam bidang pembuatan proposal, seperti yang pernah berlangsung selama ini. Oleh karena itu, agar bisa meluruskan arah atau desain perekonomian Aceh ke depan, pemerintahan ZainiMuzakir harus juga melakukan penguatan pendidikan ekonomi bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat pun bisa mendukung atau

bertindak sesuai dengan yang dicitacitakan pemerintah.

22 Ekonomi Peradaban Melalui tulisan ini, saya memberikan 2 (dua) peluang yang perlu direspon oleh Pemerintahan ZIKIR agar selalu dikenang oleh kalangan bawah, yaitu pembangunan ekonomi berbasis one district one product dan desain implementasi berbasis ekonomi kawasan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat Aceh. One District One Product Desain ekonomi Aceh di bawah kepemimpinan ZIKIR sudah seharusnya pada pembangunan one district one product. Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus dirangsang atau harus dibina oleh Pemerintah ZIKIR secara kontinu selama 5 tahun ke depan.

Pembinaan berbasis one district one product harus diarahkan untuk pengembangan potensi di masing-masing Kabupaten/Kota. Desain ini tentu saja harus dibuat dengan analisa ekonomi yang berkelanjutan, sehingga akan berdampak pada perubahan kualitas hidup masyarakat Aceh. Pemerintah ZainiMuzakir yang dipilih secara demokratis dalam Pilkada 2012 lalu, tentu tak mau kalah pamor dengan Irwandi YusufMuhammad Nazar yang mengembangkan pembangunan berbasis kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa dan biaya pendidikan anak yatim.

Saya melihat, dari awal pemerintahan ZIKIR memiliki niat yang menggelora untuk serius mendesain pembangunan pemerin tahannya berbasis ekonomi. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan irigasi dengan skala besar dan berkualitas di seluruh Aceh. Desain ekonomi Aceh di bawah ZIKIR harus berpedoman pada kebutuhan dan kemampuan Kabupaten/Kota di Aceh. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan meluncurkan program ekonomi dengan desain pembangunan ekonomi Aceh berbasis one district one product.

Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 23 Ekonomi Kawasan Dalam field (kunjunga lapangan), dalam rangka pemantauan kemajuan Proyek yang dibiayai oleh APBA, Senin (15/10/2012) di Kucatacane, Aceh Tenggara, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan kepada masyarakat dan media bahwa 5 tahun ke depan selama pemerintahan ZIKIR (ZainiMuzakir), semua kawasan di Aceh, baik kawasan ALA, ABAS, dan Aceh pesisir harus dibangun dengan keadilan, pemerataan, keseimbangan, dan integratif. Muzakir menjelaskan, sebagaimana dikutip media bahwa salah satu strategi pembangunan Aceh ke depan yakni harus mampu mengejar ketertinggalan dari berbagai sektor pembangunan

yang selama ini terabaikan termasuk ekonomi pada wilayah Tenggara, tengah, Selatan, dan Barat Selatan.

Desain pembangunan ekonomi kawasan ini menjadi prioritas selama 5 tahun pemerintahan ZIKIR. Pada sisi lain, ini akan berdampak pada menurunnya semangat pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi ABAS. Menurut saya, resistensi akan besar sekali bila implementasi ekonomi kawasan ini tidak dijalankan dengan baik selama 5 tahun ke depan. Seperti diketahui, rencana pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi ABAS nyaris lengkap semua syarat administrasinya kecuali rekomendasi provinsi induk yaitu provinsi Aceh.

Rekomendasi tersebut terkendala dengan program moratorium pembentukan provinsi baru di Indonesia oleh pemerintah SBY. Harus diakui bahwa cita-cita merdeka masyarakat kawasan Aceh Lauser dan kawasan Barat Selatan disebabkan persoalan keadilan pembangunan ekonomi yang timpang. Hal ini seperti ketika Aceh secara keseluruhan meminta merdeka dari pemerintah pusat, juga karena merasa tidak adil dalam pembangunan ekonomi. Jadi, menerjemahkan statemen dari Muzakir Manaf dalam kunjungannya ke Aceh Tenggara, dalam hal ekonomi, kawasan ini 24 Ekonomi Peradaban akan membuka pemerataan pembangunan dalam lingkup Aceh yang utuh untuk selamanya.

Namun, jika selama 5 tahun ke depan, Pemerintah ZIKIR tidak mampu mewujudkan desain distribusi ekonomi kawasan yang adil, merata, seimbang, dan integral maka kemerdekaan ALA dan ABAS tinggal menunggu momentum saja. Akhirnya, masyarakat Aceh memiliki harapan besar pada kepemimpinan Zaini Muzakir untuk berkonsentrasi pada bidang pembangunan ekonomi. Bila pemerintahan Irwandi Yusuf Muhammad Nazar populer dengan desain pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan dengan program JKA dan Program Beasiswa, maka Zaini Muzakir harus menjadi idola bagi petani, pengangguran, masyarakat miskin, dan penyandang status sosial yang kurang beruntung lewat program spektakuler dalam bidang pembangunan ekonomi. Saat ini, masyarakat menunggu-nunggu gerakan Zaini Muzakir dalam implementasi hasil desain ekonomi Aceh ke depan.

Sebuah desain ekonomi yang bisa disebut spektakuler. 1.7 MENDORONG PENGEMBANGAN BANK SYARIAH Kehadiran bank syariah di Indonesia ditandai dengan dibukanya Bank

Muallamat pada tahun 1992. Bank pertama yang menerapkan sistem perbankan syariah itu terbukti sangat tangguh ketika menghadapi krisis moneter 1997 silam. Di saat seluruh bank konvensional di negeri ini nyaris bangkrut, Bank Muamalat tetap santai menjalankan roda bisnisnya.

Kebangkitan bank syariah kala itu bersamaan dengan kebangkitan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) di Indonesia. Fakta ini dijadikan renungan mendalam bagi pemilik bank konvensional, pada akhirnya mendirikan anak perusahaan berbasis syariah. Sehingga, tak heran akhirnya seluruh bank konvensional mendirikan anak perusahaan atau unit syariah pada bank tersebut. Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 25 Ditambah lagi berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di sejumlah daerah termasuk Aceh.

Data Bank Indonesia Perwakilan Aceh menyatakan jumlah bank syariah dan konvensional di Aceh sampai akhir tahun 2013 sebanyak 419 unit termasuk kantor cabang dan cabang pembantu. Perkembangan bank syariah di Aceh cukup baik, pada triwulan II tahun 2013, total aset perbankan syariah meningkat sebesar 34,88 persen. Meski tercatat melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan triwulan IV tahun 2012 sebesar 35,99 persen, namun pertumbuhan tahunan di atas 20 persen tersebut masih menunjukkan potensi berkembangnya bank syariah untuk melakukan pembiayaan dan berpartisipasi menjadi stimulus bagi perekonomian Aceh.

Kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada triwulan ketiga tahun lalu didominasi oleh simpanan tabungan proporsi sebesar 41,03%, disusul oleh deposito dan giro dengan proporsi masing-masing sebesar 32,54% dan 26,43%. Bila ditilik dari pertumbuhannya, tercatat simpanan giro mengalami pertumbuhan terbesar mencapai 172,01% (yoy). Dari sisi pembiayaan, berdasarkan jenisnya, penyaluran pembiayaan konsumsi masih dominan dibandingkan dengan penggunaan kredit lainnya.

Minimnya risiko dalam penyaluran pembiayaan konsumsi tercermin dari rasio risiko pembiayaan non lancar (Non Performing Loan) yang masih di angka 2,74% per triwulan II tahun 2013, jauh dibawah NPL pembiayaan Modal Kerja dan Konsumsi. Sedangkan pembiayaan sektor produktif seperti modal kerja dan investasi masing-masing hanya 29,37 persen dan 7,42 persen. Dari data itu, seharusnya perkembangan bank syariah di Aceh jauh

lebih cepat mengingat provinsi ujung barat Sumatera itu memberlakukan syariat Islam.

Pemandangan kontras terlihat antara bank konvensional yang dipenuhi puluhan masyarakat 26 Ekonomi Peradaban setiap hari, sedangkan kantor bank syariah selalu sepi nasabah yang mengantre. Masyarakat Aceh dipastikan mengetahui bahwa bunga bank itu riba (haram). Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2004 lalu telah mengeluarkan fatwa menyatakan bunga bank riba (haram). Lambannya perkembangan bank syariah di Aceh setidaknya tidaknya disebabkan dua faktor yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang operasional bank syariah dan minimnya jaringan bank syariah sehingga tidak menjangkau pelosok kecamatan seperti bank konvensional.

Dukungan Semua Pihak Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang perbankan syariah dengan segala kelebihanannya, diperlukan dukungan semua pihak, baik itu pemerintah, ulama, asosiasi perbankan, perguruan tinggi, serta kelompok keuangan mitra bank (KKMB). Pemerintah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebaiknya mengeluarkan seruan bersama kepada seluruh instansi pemerintah dan instansi pendidikan agar menggunakan jasa perbankan syariah dalam transaksi keuangannya.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan barubaru ini mengeluarkan seruan agar seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di provinsi itu membuka rekening di bank syariah. Sehingga, pemerintah mentransfer gaji melalui rekening bank syariah yang dimiliki PNS. Langkah ini diambil untuk menghindari riba. Sosialisasi seruan tersebut dilakukan oleh semua pihak. Jangan biarkan bank syariah berjuang sendiri memberi pemahaman pada masyarakat. Ulama bisa mengagendakan sosialisasi bank syariah melalui pendidikan di dayah dan ceramah Jumat secara berkelanjutan.

Sehingga, masyarakat Aceh paham tentang plus minus perbankan syariah. Ekonomi Peradaban dalam Ekonomi 27 Jangan sampai, seruan tentang perbankan syariah itu ber nasib sama dengan Fatwa MUI No 1/2004 tentang bunga bank yang he boh sesaat lalu hilang ditelan zaman. Perlu konsistensi dalam men sosialisasikan praktik perbankan syariah pada masyarakat. Potensi lain yang bisa digunakan untuk mensosialisasikan sistem perbankan syariah adalah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

Selama ini, KKMB terkesan berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten/kota. Padahal, organisasi ini berperan besar menghubungkan UMKMK dengan perbankan. Bank Indonesia baik di Lhokseumawe dan Banda Aceh telah mendidik puluhan tenaga KKMB. Mereka tidak diberi gaji per bulan, hanya mendapat biaya jasa dari UMKMK yang berhasil mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Ratarata kredit yang disalurkan melalui bantuan KKMB di Aceh sekitar Rp 5Rp10 miliar per tahun.

Jika mereka diberi sedikit insentif dari pemerintah daerah, tentu mereka bisa bekerja ekstra, mensosialisasikan jasa perbankan syariah pada masyarakat serta menghubungkan UMKMK pada bank syariah di Aceh. Harapannya, penyaluran kredit bank syariah tidak lagi didominasi pembiayaan konsumsi, namun cenderung pembiayaan modal kerja pada UMKMK. Dampak lainnya adalah terciptanya lapangan kerja dan mengurai angka pengangguran di provinsi ini.

Persoalan lainnya adalah minimnya jaringan perbankan syariah di Aceh. Manajemen bank syariah harus menyakini bahwa kondisi keamanan di Aceh cukup kondusif untuk melakukan ekspansi kantor cabang atau kantor cabang pembantu dan mendekatkan layanan perbankan syariah pada masyarakat di kecamatan. Salah satu cara efektif mensosialisasikan perbankan syariah adalah memperlihatkan wujud bank syariah pada masyarakat di kotakota kecamatan.

Sehingga, masyarakat yakin bahwa bank tersebut benar ada dan dijamin keamanan uangnya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Masyarakat awam berpandangan bahwa tidak ada 28 Ekonomi Peradabannya kantor perbankan di kecamatan, menimbulkan kekhawatiran untuk menyimpan uang pada bank tersebut. Khawatir bank yang membuka kantor di pusat kabupaten tutup sehingga mereka tidak mengetahui nasib uang yang disimpan pada bank tersebut. Forum Segi Lima Perlu dibentuk forum segi lima yaitu pemerintah, Bank Indonesia, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), perguruan tinggi, dan ulama untuk mendukung upaya pengembangan perbankan syariah di Aceh.

Perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam dan mendirikan pusat penelitian perbankan bisa mencari akar persoalan lambatnya perkembangan syariah dan memberi alternatif solusi. Ulama bisa menyampaikan pada umat dengan metode dakwah

masingmasing. Pemerintah bisa memberikan kebijakan terbaik untuk mendukung percepatan pengembangan bank syariah di Aceh. Forum ini pula yang mengontrol konsistensi sosialisasi perbankan syariah kepada rakyat dan mengajak pengusaha perbankan syariah untuk terus mendekatkan layanannya ke seluruh pelosok Aceh. Jika ini dilakukan secara berkelanjutan, maka lima tahun ke depan, Aceh menjadi model pengembangan syariah terbaik di negeri ini.

Sudah saatnya, kita tidak hanya menerapkan syariat Islam sebatas wacana, namun minim praktik. Saatnya, kita menerapkan sistim perbankan syariah di nanggroe Iskandar Muda. Pada akhirnya, kita bertanggungjawab untuk menghindarkan masyarakat menikmati hasil riba yang jelasjelas diharamkan dalam Islam. Salah satu hadis yang menerangkan riba diriwayatkan Ibn Majah berbunyi Rasulullah bersabda riba adalah tujuh puluh dosa, dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya. oo0oo

2.1 RUNTUHNYA MODAL SOSIAL DI ACEH K ehidupan pasca-tsunami konflik Aceh sangat mengkhawatirkan.

Kehidupan sosial di Aceh saat ini mengalami sejumlah permasalahan sosial. Mulai dari degradasi moral siswa sampai runtuhnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan toleransi antar orang dewasa. Sebelumnya, dalam banyak literatur sejarah Aceh disebutkan bahwa Aceh memiliki ciri khas dan modal sosial yang hebat dalam bidang adat istiadat, pendidikan, dan agama. Karena modal sosial yang hebat itu pula, Aceh selalu berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memanyungi modal sosial Aceh itu dengan sejumlah perundangan. Awalnya, konsep modal sosial ini dipopulerkan oleh Puyyman dan Fukuyama yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan masyarakat. Di Indonesia, konsep social capital diterjemahkan sebagai modal sosial. Menurut Hasbullah (2006: 916), unsur-unsur pokok dari modal sosial adalah: 1) partisipasi dalam suatu jaringan masyarakat, 2) hubungan timbal balik (reciprocity), 3) kepercayaan (trust), 4) norma-norma sosial, 5) Bab 2 EKONOMI PERADABAN DALAM POLITIK 30 Ekonomi Peradaban nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat, dan 6) tindakan yang proaktif.

Posisi Aceh yang hebat dengan modal sosial (social capital), ditambah sikap harga diri yang

tinggi, menjadi salah satu senjata untuk memberontak melawan ketidakadilan pemerintah pusat. Namun kondisi Aceh saat ini, pemerintah pusat tidak memiliki hubungan timbal balik (reciprocity) dengan Aceh. Karena Aceh telah damai dan kekuasaan berada pada diri orang Aceh. Maka dari itu, masyarakat Aceh dalam segala kelebihanannya, selalu menganggap dirinya sebagai sebuah bangsa teuleubeh (baca: punya nilai lebih) baik dari segi pemikiran, pendidikan, dan nilai-nilai sosial. Modal sosial tersebut ditata dalam pengelolaan masyarakat yang bernilai tinggi.

Di Aceh dulunya, modal sosial menjadi perekat dalam bertoleransi. Norma agama, sosial, dan pendidikan menjadi aspek penting dalam segala kebijakan warga desa. Jika sebuah keluarga melakukan sebuah tindakan yang melanggar norma agama di sebuah desa, akan dianggap sebagai aib. Dalam hal ini, pasti akan ada modal sosial yang berperan memberi efek jera dan dipatuhi oleh semua warga. Setiap keputusan yang diambil para pemimpin desa akan dipatuhi dengan segenap hati oleh semua warga.

Saat ini, melihat berbagai fenomena sosial dari segi agama, adat istiadat, dan pendidikan yang pernah dan sedang terjadi di Aceh, modal sosial (social capital) di Aceh seperti sudah runtuh berkeping-keping karena gilasan gelombang tsunami dan konflik. Sejatinya, menurut Ife dan Tesoriero (2003:3), modal sosial berfungsi sebagai perekat yang dapat menyatukan masyarakat dalam berhubungan antar manusia, kewajiban sosial sesamanya, dan solidaritas sosial antar warga.

Menurut Ife dan Tesoriero, dengan adanya modal sosial dapat mengarahkan orang-orang Ekonomi Peradaban dalam Politik 31 untuk berbagi kekuasaan (power sharing) yang dilandasi oleh nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah yang menyakitkan masyarakat Aceh. Seakan-akan kehidupan bermasyarakat di Aceh sudah terlepas dari modal sosial. Rasa solidaritas sesama warga, rasa empati, dan rasa kepedulian sesama warga sudah diganti dengan rasa keangkuhan dengan basis ekonomi.

Nilai kehidupan Di Aceh hari ini dihormati, disegani, dan dimuliakan bila kita memiliki kondisi ekonomi yang mapan/ tinggi. Tidak lagi berdasarkan pada modal sosial dengan prinsip saling berbagi dan saling peduli. Degradasi Moral Sikap dan kecintaan orang Aceh terhadap ilmu sangat tinggi dari masa ke masa. Salah satu modal sosial dalam sektor

pendidikan adalah sikap elegan untuk mewakafkan sebagian harta masyarakat Aceh untuk bidang pendidikan.

Makanya tak heran, karena kuatnya modal sosial dalam sektor pendidikan, banyak dayahdayah dan sekolahsekolah di Aceh yang asal muasalnya dibangun di atas tanah wakaf dari warga. Namun akhirakhir ini, makin langka kita mendengar di Aceh ada wakaf untuk kepentingan pendidikan. Malah yang terjadi adalah sejumlah praktik penyegelan sekolah, tawuran dan degradasi moral peserta didik yang mulai mengancam eksistensi tujuan pendidikan yang sebenarnya. Hari ini, yang terjadi adalah pemimpin saja tidak diikuti seruannya oleh peserta didik dan warga.

Bahkan bila ada isu yang negatif terhadap pemimpin langsung disulut oleh warga lainnya, sehingga berlanjut dengan sikap anarkis para pihak. Setiap muncul pencerahan atau ada gagasan baru di Aceh dari seorang pemimpin, selalu direspon dengan sikap saling curiga. Di sisi lain, kondisi generasi masa depan Aceh yang mengalami degradasi moral semakin tajam, membuat sendisendi kehidupan 32 Ekonomi Peradaban yang baik semakin sirna (memudarnya modal sosial).

Tatanan kehidupan yang semakin merosot ini dapat juga diartikan sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan warga desa, dalam membangun keharmonisan kehidupan yang baik sesama warga dan elit. Pemerintah ikut andil besar dalam degradasi moral anak bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam implimentasi pendidikan nasional, hampir tidak memiliki karakter yang jelas untuk melahirkan kualitas generasi yang berbasis keilmuan dan moralitas. Tidak mengherankan kalau di era reformasi ini kita semua membiarkan perkembangan kebebasan diterjemahkan sesuai kepentingan golongan masingmasing.

Tidak ada lembaga yang bisa mengarahkan dan membimbing kepada kemaslahatan umat secara massif dan holistik. Reformasi pun menjadi kebablasan. Mengakhiri tulisan ini, saya mengusulkan ada dua hal kecil yang dapat kita lakukan bersamasama untuk memperbaiki kondisi degradasi moral anak bangsa. Pertama, adanya gerakan penanaman nilai-nilai etika dan moral dalam bentuk yang strategis pada semua jenjang studi pendidikan di Aceh. Kedua, diperlukan gerakan revitalisasi modal sosial yang mulai runtuh pascatsunami dan konflik secara proaktif. 2.2

MENGISI WALI NANGGROE Diskursus keberadaan Wali Nanggroe belum juga usai. Hal semacam ini menandakan harapan lebih dari kehadiran Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan lokal di Aceh. Karena harapan dalam perspektif kebaikan Aceh, tentu semua elemen harus berpikir ekstra keras supaya kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tidak menimbulkan huruhara. Untuk itu, tak salah bila para cendekiawan Aceh ikut memberi kontribusi pemikiran menyangkut Wali Nanggroe.

Maju dan mundurnya Aceh, juga tak bisa lepas dari peran cendekia kampus, Ekonomi Peradaban dalam Politik 33 dayah, dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, penyatuan visi dalam melihat Aceh sebagai sebuah identitas dan entitas kebangsaan bersama harus diberi dukungan dan apresiasi. Secara pribadi, saya termasuk yang berpikir rasional. Artinya kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tidak selalu harus dikaitkan dengan kekuatan politik semata. Saya melihat, keberadaan Wali Nanggroe harus benar-benar menjadi lembaga kebudayaan.

Karenanya, diskursus Wali Nanggroe harus keluar dari cara berpikir setuju versus tidak setuju, melainkan harus mengarah pada substansi kemaslahatan secara komprehensif. Apa dan bagaimana pola kerja Wali Nanggroe harus ditunjukkan untuk kemaslahatan semua etnik di Aceh. Perdebatan dalam ranah politik yang muncul antar lembaga pemerintah menyangkut Wali Nanggroe setidaknya perlu segera direduksi. Apalagi perdebatan di level rakyat versus rakyat juga terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa diskursus Wali Nanggroe tidak berjalan pada fase substantif.

Melainkan terus terusan berjalan pada rel simbolik, setuju versus tidak setuju. Kalau cara pandanganya seperti ini, saya khawatir Pemda Aceh tidak akan maksimal meningkatkan kinerjanya, bila masih diselimuti persoalan-persoalan simbolik. Lembaga Kebudayaan Aceh dan masih ruang yang perlu diisi secara bersamasama. Salah satunya adalah ruang kebudayaan. Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) 2013, menjadi bukti bahwa ruang kebudayaan di Aceh perlu dikelola secara baik, sistematis, dan profesional.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, sistematis, dan profesional, maka PKA ke depan harus benar-benar berlangsung atas sendisendi kebudayaan Aceh yang benar, dan bukan

sekadar kebudayaan tong setan. Maka Lembaga Wali Nanggroe memiliki peluang untuk menjadi pionir. 34 Ekonomi Peradaban Ke depan, Lembaga Wali Nanggroe (LWI) harus benar-benar difungsikan sesuai dengan tupoksinya (tugas, pokok dan fungsi, ed). Keberadaan Wali Nanggroe bukan menjadi milik sekelompok masyarakat, melainkan harus menjadi milik semua strata masyarakat Aceh. Karena itu, sudah sepatutnya Lembaga Wali Nanggroe tak hanya diisi oleh satu kelompok saja, melainkan harus melibatkan semua elemen masyarakat Aceh yang memiliki kapasitas keilmuan dan ketokohnya. Masyarakat Aceh punya hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi pembangunan Aceh yang lebih baik dan bermartabat.

Sehingga dengan kehadiran Lembaga Wali Nanggroe, masyarakat dapat didorong untuk mengisi pembangunan Aceh secara bersamasama. Secara kepemimpinan, Lembaga Wali Nanggroe harus dipimpin secara kolektif kologial, bukan menonjolkan personal seseorang. Dengan sistem pengambilan keputusan kolektif kologial, maka Lembaga Wali Nanggroe akan terhindar menjadi lembaga super body Pemerintah Aceh di bawah Zaini Abdullah Muzakir Manaf. Spirit Persatuan Secara pribadi pula, saya melihat spirit awal lahirnya Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai pemersatu.

Maka tidak ada pilihan untuk melawan dari spirit yang mulia seperti itu. Spirit pemersatu harus benar-benar ditelurkan secara sistematis. Jika tidak, ini akan menjadi umpan balik yang dapat membahayakan eksistensi Aceh. Ada beberapa poin yang perlu dilakukan oleh Wali Nanggroe setelah disahkan, sebagai upaya menjaga spirit pemersatu. Pertama, hal yang bisa dilakukan oleh Wali Nanggroe segera mungkin setelah dilantik adalah menyelenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh.

Musyawarah itu perlu dilakukan dengan melibatkan semua unsur tokoh adat, budaya, dan agama. Tujuannya supaya Lembaga Wali Nanggroe menjadi lembaga yang dihormati. Ekonomi Peradaban dalam Politik 35 Kedua, harus menempatkan personil personil dalam struktur Wali Nanggroe yang memiliki ilmu agama tinggi dan berka risma dalam kehidupan sosial politiknya. Keberadaan mereka dapat membuat Lembaga Wali Nanggroe semakin berwibawa dan bermartabat. Ketiga, segera setelah disahkan menjadi Wali Nanggroe, pesonil yang terlibat dalam stukturanya harus keluar dari Partai Politik.

Wali Nanggroe dan personil dalam strukturnya harus diisi oleh orang-orang yang independen untuk dapat mewujudkan spirit sebagai pemersatu Aceh. Hal ini untuk menghindari tuduhan bahwa Lembaga Wali Nanggroe hanya diisi oleh satu kelompok saja. Keempat, dalam struktur Lembaga Wali Nanggroe harus memiliki keterwakilan daerah, karena Aceh memiliki ragam perbedaan dalam kebudayaan dan sosial. Kelima, Lembaga Wali Nanggroe menjadi lembaga penengah dalam setiap kemelut warga terutama menyangkut persoalan-persoalan sosial budaya dan keagamaan, bukan hanya menjadi penengah dalam polemik antar lembaga pemerintah dan politik praktis. Kita harus berhenti memperdebatkan personalitas Wali Nanggroe.

Karena kalau hal itu terus diperdebatkan, banyak energi yang akan terkuras. Sudah saatnya, semua elemen bangsa berpikir supaya kelembagaan Wali Nanggroe benar-benar dapat membawa manfaat bagi kemakmuran Aceh. Hal ini juga untuk menghindari masyarakat memperdebatkan soal-soal simbolik. Simbolisme kadang kalanya mengalahkan makna hakiki sesuatu yang dicitacitakan. Maka, gerakan bermotif simbolik biasanya tidak memiliki nilai berkelanjutan dalam setiap gagasan dalam pembangunan.

Untuk itu, semua elemen rakyat Aceh harus memberi kontribusi dalam mengisi pembangunan Aceh saat ini. Aceh ke depan harus bisa berdiri sendiri secara mandiri. Aceh harus bisa berlari cepat dalam meninggalkan beragam ketertinggalan, salah satu alatnya adalah Wali Nanggroe. 36 Ekonomi Peradaban 2.3 BELAJAR DARI HIROSHIMA Kunjungan kerja ke Jepang kali ini, saya didampingi Pembantu Rektor Iskandar Zulkarnaen. Saya diundang menghadiri acara Six University Initiative JapanIndonesia (SUIJI).

Ini adalah kunjungan kerja yang harus direspon dalam upaya membangun eksistensi Universitas Malikussaleh ke depan dalam pencatatan akademis berbasis lokal, nasional, dan internasional. Berangkat melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, 25 Agustus 2013 menuju Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kami menggunakan maskapai penerbangan Malaysian Airlines (MAS) dan tiba di Jepang pada 27 Agustus 2013. Di Jepang, kami memiliki beberapa agenda dengan sejumlah Universitas. Salah satunya di Kochi University mengikuti pertemuan SUIJI (Six University Initiative JapanIndonesia).

SUIJI adalah konsorsium 6 rektor yang mendeklarasikan inisiatif di Bali pada 7 Agustus 2010 yang lalu. Fokus aktivitas konsorsium ini adalah mendukung ketahanan pangan dunia melalui kerjasama perguruan tinggi Indonesia-Jepang. Kegiatan yang dilaksanakan berupa riset bersama, joint degree dan kegiatan pelayanan berbasis komunitas. Selanjutnya kami singgah di Hiroshima, mengunjungi beberapa University di sana untuk memperkenalkan Universitas Malikussaleh.

Kota Hiroshima adalah kota penuh kenangan sejarah bagi warga dunia. Makanya sampai saat ini sejumlah lokasi wisata, seperti Monumen Perdamaian Hiroshima, Istana Hiroshima, dan lainnya menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Hiroshima. Kita harus belajar banyak dari semangat hidup warga Hiroshima. Bagaimana tidak. Setelah luluh lantak dibombardir 3.5 ton bom atom oleh Amerika Serikat, Hiroshima bisa bangkit Ekonomi Peradaban dalam Politik 37 melawan ketidakberdayaan dengan kemegahan teknologi yang dimilikinya saat ini. Etos kerja warga Hiroshima dan Jepang umumnya membuat kagum. Mereka dapat bangkit dari keterpurukan.

Kita bisa membayangkan efek yang ditimbulkan setelah serangan Bom Atom adalah penderitaan berkepanjangan dari generasi ke generasi akibat radiasi kimia, dengan dampak genetika. Bom atom yang jatuh di Kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 membunuh sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 di Nagasaki pada 9 Agustus tahun 1945. Sejarah mencatat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) Hiroshima ikut hilang ditelan bom atom yang menankutkan itu, dan kita berpikir Hiroshima akan menjadi mati. mereka bangkit filosofi kebersamaan.

Kesamaan tekad dan keinginan tersebut membuat pemerintah dapat membangun kembali kota Hiroshima secara cepat dan tepat sasaran. Salah satu unsurnya adanya pelibatan warga secara sukarela. Kecerdasan pikiran yang mereka miliki, tidak banyak dialokasikan untuk saling mengkritik setiap fase pembangunan yang dilakukan pemerintah akibat dari bom atom. Namun, masyarakat Hiroshima lebih bangga bila mereka bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negaranya.

Kaumkaum intelektual yang tersisa dari bom mematikan itu benar-benar difungsikan dengan baik oleh pemerintah sebagai peneliti yang baik dan penuh dengan etos kerja. Sebagian

hasil penelitian insan kampus, benar benar diimplimentasikan oleh pemerintah setempat, karena ada rasa saling percaya antar pemerintah dengan insan kampus. Masyarakat Jepang secara umum masih percaya bahwa suatu program yang baik dan bernilai harus berdasarkan hasil penelitian.

Maka, banyak hasilhasil teknologi yang lahir dari Jepang, berasal 38 Ekonomi Peradaban dari gagasan insan kampus mereka sendiri. Hal ini setidaknya menjadi catatan tersendiri bagi insan kampus dan pemerintah Aceh. Pengalaman Hiroshima benarbenar menjadi inspirasi kolektif dalam Aceh 30 dan tsunami 2004. Pembangunan Aceh yang baik harus berlandaskan penelitian. Hal itu telah terbukti dari konsep pembangunan Hiroshima. Aceh harus dibangun bukan berlandaskan bisikan dan kawom (politik kawom).

Bila pembangunan Aceh di bawah Pemerintahan Zaini AbdullahMuzakir Manaf tidak melibatkan perisetperiset handal dari insan kampus dalam setiap perancangan pembangunan, maka Aceh tidak menjadikan pembagunan Hiroshima sebagai inspirasinya. Jika dan tidak inspirasi kolektif antar warga, akademisi, pengusaha, dan ulama dalam setiap pembangunan Aceh, makahal ini akan menjadi batu sandungan dalam derap pembangunan Aceh ke depan. Karena itu, sudah sepatutnya kita harus belajar dari Hiroshima. 2.4

ACEH DALAM WACANA DISINTEGRASI Gejolak disintegrasi Aceh kembali menjadi sajian utama di media massa sepanjang AprilMei 2013. Bedanya kalau dulu bersifat vertikal antara Aceh dengan Pemerintah Indonesia, saat ini alirannya Horizontal, antara sesama masyarakat Aceh. Jika dahulu alat perjuangannya adalah GAM dengan alasan ketidakadilan. Saat ini alatnya adalah ALA (Aceh Leuser Antara, ed) dan ABAS (Aceh Barat Selatan, ed) dengan alasan sama, yaitu ketidakadilan.

Ujungnya bermuara pada tuntutan kemardekaan dalam wacana disintegrasi Provinsial. Ikhwal disintegrasi tentu bermuara pada pembagian kekua saan berbasis ekonomi. Pemerataan dan keadilan pada sektor eko nomi menjadi alasan pokok dalam munculnya wacana dan gerakan pemisahan ALA dan ABAS. Wacana disintegrasi provinsi Aceh Ekonomi Peradaban dalam Politik 39 tentu akan menjadi batu sandungan dalam pengembangan Aceh ke depan. Pemangku kepentingan harus hatihati dalam merespon dan mengelola

pewacanaan disintegrasi Aceh.

Jika wacana ini tidak dikelola secara holistik dan berbasis keadilan, maka akan menjadi wacana masif yang meresahkan ketentraman politik sosial di Aceh. Pemulihan paska di sangat dilakukan, untuk mengembalikan harapan masyarakat setelah menderita konflik. Pengembalian itu harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan objektif. Karena selalu dengan kekayaan kekuasaan. Kalau distribusi kekuasaan yang telah diperoleh GAM melalui Pilkada (pemilihan kepala daerah, ed) tidak mampu memberikan dampak yang menyeluruh bagi warga Aceh keseluruhan, akibatnya bukan saja terjadi disintegrasi Aceh, melainkan akan membawa Aceh pada gelombang perang saudara antar elemen (etnik) masyarakat Aceh.

Menurut Zulfan Tadjoeeddin (2011), setidaknya ada enam (6) risiko konflik: distribusi yang tidak merata, pengelolaan sumber daya alam yang didominasi oleh pemain baru, kontrak sosial, transformasi sosial, dan biaya yang untuk baru. Karena konflik dari kehidupan maka inheren manusia. selalu dampak besar kehidupan masyarakat. Collier, Hoeffler, Mans Soderbom (2006:2) mengungkapkan bahwa masyarakat pasca selalu dua yang yaitu pemulihan ekonomi dan pengurangan risiko. Perdamaian pasca-konflik rapuh, setengah semua sipil paska konflik di dunia timbul kembali.

Belajar konflik kehidupan di seperti siklus dan Siklus dan masyarakat Aceh selalu lahir baik bersifat vertikal (Aceh dengan pemerintah 40 Ekonomi Peradaban Pusat), maupun horizontal (masyarakat Aceh versus masyarakat Aceh). Tatanan masyarakat Aceh selalu berjalan secara sistematis dalam Konflik-Damai. itu berputar by design maupun secara alamiah. Ketika siklus berada pada ranah semua merapat berfikir mengupayakan damai. Begitu juga sebaliknya, ketika kondisi Aceh berada pada titik damai, ada saja baik secara sengaja atau tidak, merapat untuk kembali ke konflik.

Risiko konflik Aceh berbentuk horizontal. Aceh dihadapkan pada kerentanan konflik kewilayahan horizontal antara wilayah Provinsi dengan wilayah kedaerahan kabupaten/kota. horizontal rentan eksistensi damai dan akan merusak sendisendi struktur masyarakat Aceh. Analisis ini diperkuat dengan laporan International Crisis Group mengenai GAM Vs GAM dalam Pemilu Aceh 2011. Artinya konflik Aceh ke depan akan lebih berdampak

sosial karena yang muncul adalah konflik horizontal, yaitu konflik sesama GAM, sesama orang Aceh, atau etnik yang berada di Aceh.

Soft Power Kalau Pemerintah Indonesia mampu melakukan pendekatan soft power menyelesaikan Aceh, kita bahwa Gubernur Aceh lebih mampu melakukan soft power untuk mempertahankan integrasi Aceh. Gubernur dengan kewenangannya harus mampu melakukan kontak people to people baik yang mengagag ALA maupun ABAS. Caracara soft power, akan lebih mudah dan meredam konflik di Aceh. Kita percaya, jika Gubernur Aceh melakukan pendekatan pendekatan yang berbasis soft power, maka kampanye yang ber akibat disintegrasi Provinsi Aceh melalui ALA dan ABAS maupun lainnya akan tereduksi.

Pemerintah Aceh harus mundur satu lang Ekonomi Peradaban dalam Politik 41 kah untuk menggapai kemenangan beberapa langkah bagi semua elemen masyarakat Aceh. Saat ini, terlihat bahwa gerakan ALA dan ABAS benar benar menjadi batu sandungan dalam implementasi program Gubernur Aceh. Gubernur sendiri harus mengambil langkah untuk meredamnya, apalagi hal ini sudah mencapai titik puncak dari perbedaan. Kita berharap semua pihak rela mundur selangkah untuk meraih kemardekaan yang sebenarnya, bukan berdasarkan simbolsimbol kedaerahan.

Wacana jika Pemerintah Aceh memaksakan bendera bin tang bulan menjadi simbol bendera daerah Aceh, maka pemerin tah pusat tak memberi jaminan Aceh akan akan tetap utuh per lu mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh. Pasalnya, lahirnya Provinsi ALA dan Provinsi ABAS menjadi kewenangan pemerintah pusat.Maka dari itu, Gubernur Aceh harus arif dan bijaksana dalam menangani potensi Gubernur mempergu nakan kewenangannya untuk kemaslahatan bersama. Sehingga po lemik simbol itu tak menggiring Aceh kembali ke pusaran konflik.

Mudahmudahan kita tidak terbuai dengan hadis yang tak jelas riwayatnya mengenai perbedaan itu adalah hikmah. Karena dalam pandangan saya di Aceh, setiap adanya perbedaan bukan hikmah yang didapatkan, melainkan berakhir pada pemberon takan. Ikhtitam Eksistensi Aceh sebagai sebuah provinsi menjadi sangat berharga bila wacana disintegrasi Aceh dapat diredam secara sistematis dan holistik. Hal ini tentunya melalui pendekatanpendekatan yang soft power.

Tidak harus melalui pendekatan yang hard power yang dapat membawa malapetaka untuk rakyat Aceh secara keseluruhan. Perdamaian Aceh benar-benar harus dikelola untuk kemaslahatan semua warga dan semua etnis yang ada di Aceh. Dengan ke 42 Ekonomi Peradaban bersamaan dan rasa kepemilikan bersama, Aceh akan mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hari ini, di bidang kebijakan ekonomi dan politik, perdamaian Aceh belum mampu terlihat mandiri.

Hal ini sangat terkait dengan sejumlah peraturan perundangundangan belum selesai di level pemerintahan pusat. Pembangunan pasca harus semua elemen. Artinya, kepemimpinan politik Aceh merupakan hak semua yang Aceh. Aceh konflik harus dibangun dengan spirit kebersamaan tanpa berpihak pada golongan tertentu, melainkan harus berpihak kepada rakyat Aceh. Aceh adalah milik orang Aceh secara keseluruhan dengan segala etnis dan keragaman budayanya. Semoga Aceh tetap utuh demi kemenangan bersama. 2.5

PEMBANGUNAN BERBASIS EMPAT PILAR KEBANGSAAN DISKURSUS pembangunan berbasis empat (4) pilar pembangunan itu penting, dalam upaya memperkuat jati diri kita dalam berbangsa dan bernegara. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.

Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah bagian dari keyakinan sebuah kebenaran terhadap eksistensi bangsa. Untuk itu, kita harus memiliki komitmen untuk mewujudkan sebuah pandangan hidup itu dalam bentuk nilai-nilai yang berdampak bagi sosial kemasyarakatan. Ekonomi Peradaban dalam Politik 43 Komitmen kebangsaan secara eksplisit telah diatur dalam UUD 1945 pada rumusan pasal yang menegaskan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat (5).

Selain itu, juga ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan

Persatuan dan Kesatuan Nasional yang substansinya antara lain mempertegas tentang perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai masalah bangsa mencapai tujuan nasional. Kesadaran Empat Pilar Kita harus sadar, berbicara 4 pilar kehidupan bernegara meliputi Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar itu semuanya adalah bagian dari cita-cita reformasi bangsa kita untuk memperjuangkan kehidupan yang adil bagi rakyatnya.

Memperjuangkan kehidupan yang baik dan berkualitas untuk semua elemen masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang terdiri dari beragam etnik, agama, budaya dan bahasa. Keragaman itu tumbuh secara subur di dalam interaksi sosial masyarakat kita. Keragaman yang ada itu diakui sejak dahulu hingga sekarang ini. Keragaman itu pula yang menjadikan bangsa kita sebagai sebuah bangsa yang besar, yang disegani oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia.

Di era globalisasi ini banyak fenomena yang kita rasakan dan dapat dijadikan tolak ukur, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar tersebut mulai memudar. Memudarnya rasa kebangsaan, dapat dilihat dari banyaknya generasi muda yang melupakan budaya bangsa dan lebih memilih budaya barat sebagai gaya hidup mereka, bahkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air sudah jarang didengungkan. 44 Ekonomi Peradaban Masalah bangsa yang paling memprihatinkan terutama justru melibatkan generasi muda karena pengaruh negatif globalisasi di Indonesia.

Pengaruh ini telah memberikan dampak kemerosotan moral bangsa yaitu maraknya peredaran narkoba, tawuran antar pemuda, pornografi dan pornoaksi. Apabila hal ini kita biarkan begitu saja tentu akan semakin menenggelamkan bangsa ini ke dalam kemerosotan nilai-nilai moral, dan dalam jangka panjang martabat bangsa kita akan semakin terpuruk. Nilai-nilai dalam 4 pilar tersebut harus kita jadikan sebagai tuntunan moral, yang harus kita jabarkan untuk dijadikan menjadi norma moral, norma hukum dan norma etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, sesungguhnya, secara formal bangsa Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dan ram-burambu yang jelas bagi pembangunan Indonesia ke depan. Kita harus

percaya, bahwa kemandirian, keamanan, kesejahteraan dan kesuksesan akan terwujud bila kita memiliki landasan ideologi, konstitusi dan komitmen kebangsaan yang kuat, serta menghargai kebhinnekaan sebagai modal kekuatan bangsa kita. Di atas segalanya, perkenankan saya memberi apresiasi kepada kita semua dalam menghargai setiap keberagaman adalah sebagai kekuatan dalam berbangsa.

Memang, era reformasi telah membawa kita pada fase degradasi dalam bidang moral, ditambah sikap egosentris keragaman dalam bentuk perpecahan. Namun itu semua harus kita landasi secara komprehensif untuk mengampanyekan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar ini kepada negara bangsa secara sistematis dan holistik. Mudah mudahan hal ini akan menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran moral secara total. [] Ekonomi Peradaban dalam Politik 45 2.6 IHWAL NILAI KEBANGSAAN SEJAK empat tahun lalu, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat, ed) gencar melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan: UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Lembaga tinggi negara ini sangat sadar bahwa upaya sosialisasi empat pilar kebangsaan itu belum cukup ampuh memberikan pemahaman kepada 237,6 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau dari sekitar 500 suku. Kesadaran itu sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh tiga hal: menurunnya nilai-nilai kebangsaan; apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kembali nilai kebangsaan itu; dan upaya perguruan tinggi merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan itu.

Pertanyaan itu awalnya sudah terjawab oleh bangsa ini saat kita sepakat mengakhiri sistem otoriter menjadi sistem demokrasi lewat Reformasi 1998. Namun, euforia reformasi berlangsung tak terkendali sehingga menimbulkan salah tafsir tentang makna kebebasan. Kebebasan yang kebablasan ini berakibat pada kekerasan antar-suku, antarkampung, antarkelompok agama, antarpendukung partai di berbagai pelosok negeri. Padahal, seluruh elemen sepakat, kebebasan yang ingin dicapai adalah bebas dari rasa takut, bebas menyampaikan pendapat, dan tegaknya supremasi hukum.

Perlu diingat, negara ini bukan negara monarki, bukan pula negara agama, melainkan negara konstitusional, yakni negara hukum yang demokratis (Adnan Buyung Nasution, 2012). Ketika kekerasan antarkelompok terjadi, timbul korban jiwa dan harta, ramairamai

pejabat negara membantah bahwa kekerasan itu disebabkan dendam lama antarkelompok atau segudang alasan lain.

Tidak ada pejabat negeri ini yang mengakui bahwa negara alpa pada salah satu pilar kebangsaannya: berbedabeda, tetapi 46 Ekonomi Peradaban satu juga. Seharusnya pejabat sadar, bangsa nenek moyang kita sangat menghormati pluralisme. Peristiwa kekerasan antarkelompok seharusnya menjadi bahan renungan untuk mengevaluasi kesadaran masyarakat bahwa kita berada di negara kepulauan dengan ratusan suku dan budaya berbeda. Idealnya suku dan budaya berbeda itu menjadi potensi kemajuan bangsa, bukan sebaliknya, menjadi ancaman terhadap ketahanan negara.

Keharmonisan suku dalam negara tertentu menjadi daya tahan bangsa dari ancaman dalam dan luar negeri. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bisa menghargai perbedaan antarsuku di dalamnya. Kekuatan itu dengan cara menyatukan perbedaan itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Supremasi hukum Persoalan lainnya adalah supremasi hukum. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas masih berlangsung di Indonesia.

Gayus Tambunan bisa pelesiran ke sejumlah negara meski statusnya terpidana merupakan bukti nyata bahwa hukum tumpul kepada mereka yang kaya dan bisa membeli pendekar keadilan kita. Sebaliknya, Nek Minah (55) di Purwokerto, Jawa Tengah, harus duduk di kursi pesakitan hanya karena mencuri tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan. Persoalan hukum semakin akut ketika puluhan kepala daerah, anggota DPR, polisi, jaksa, hakim, sampai pengacara terlibat dalam kasus korupsi. Mereka menyandang status tersangka dan terdakwa kasus korupsi, tapi masih bisa unjuk gigi mengenakan pakaian mode terbaru dan bangga tampil di layar televisi.

Realitas ini melengkapi krisis kepercayaan anak negeri pada penegakan hukum di negara gemah ripah loh jinawi. Ini pula yang Ekonomi Peradaban dalam Politik 47 menyebabkan pudarnya nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat. Rakyat butuh contoh suri teladan dari aparatur negara. Bukan terjepit di antara kokohnya tangantangan mereka yang berkuasa. Pemerataan pembangunan juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin bangsa. Sebagai negara kepulauan, sudah sepatutnya semua provinsi di Indonesia mendapat pemerataan

pendidikan berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta layanan kesehatan yang baik sehingga setiap orang bisa merasakan bahwa negara hadir ketika mereka membutuhkannya.

Rakyat mencintai negaranya karena negara juga memberi hak kepada rakyat sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa infrastruktur lembaga pendidikan di kawasan teras Indonesia seperti Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua hingga kini belum memadai. Masih ditemukan sekolah yang rentan roboh.

Selain itu, kompetensi guru dan dosen juga belum sebanding dengan provinsi di Jawa sehingga ketika lembaga pendidikan di Jawa sudah berpikir go international, kawasan teras Indonesia masih terseokseok mengejar ketertinggalan dan berusaha setara dengan provinsi lainnya. Menghias rumah Atas ironi ini, perlu dicari solusi. Pemerintah pusat harus berpikir dengan logika menghias rumah: mempercantik teras agar indah dilihat tamu dan tetangga, juga mengatur bagian dalam rumah agar tamu nyaman di dalamnya.

Citacita mulia yang dirumuskan pendiri bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sebatas teks keramat buat anak cucu, tetapi harus direalisasikan kepada generasi berikutnya 48 Ekonomi Peradaban sehingga rakyat merasa bahwa negara ini benar-benar telah menjalankan sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda butuh waktu. Dampaknya baru bisa dirasakan 510 tahun mendatang. Karena itu, mari merenung dan meresapi apakah kita sudah memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bernegara? [] oo0oo Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh Harian Rakyat Aceh, Banda Aceh Harian Kompas, Jakarta oo0oo DAFTAR PUSTAKA

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

[View all sources](#)

